

# ANALISIS BELANJA OPERASI DAN BELANJA MODAL PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sandhita Akita Rinaldy<sup>1</sup>, Raju Maulana<sup>2</sup>, Muchlis<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Management Study Program, Faculty of Economics and Business, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

\*e-mail:

## Article Info

### Article history:

Received 03 05, 2026

Revision 03 15, 2026

Accepted 03 31, 2026

**Kata Kunci:** Kinerja keuangan, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio keserasian belanja, Inspektorat Daerah.

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio belanja operasional dan rasio belanja modal sebagai indikator kinerja keuangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Analisis terhadap komposisi belanja sangat penting untuk menilai keseimbangan alokasi anggaran antara kebutuhan operasional dan investasi modal dalam mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun anggaran 2023–2024, yang dikumpulkan melalui metode dokumentasi dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan pendekatan rasio keserasian, yang mencakup rasio belanja operasional dan rasio belanja modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio belanja operasional tercatat sebesar 96,9% pada tahun 2023 dan 95,4% pada tahun 2024, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar anggaran dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional organisasi. Sementara itu, rasio belanja modal meningkat dari 3,0% pada tahun 2023 menjadi 4,5% pada tahun 2024, mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi pada aset tetap dan fasilitas pendukung kegiatan pengawasan. Meskipun proporsi belanja modal masih relatif rendah dibandingkan dengan belanja operasional, kondisi ini dinilai wajar mengingat karakteristik Inspektorat Daerah sebagai instansi pemerintah yang lebih berfokus pada pengawasan internal dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik. Dengan demikian, pengelolaan belanja Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan kinerja keuangan yang relatif seimbang dan selaras dengan karakteristik operasional organisasi. Kendati demikian, peningkatan alokasi belanja modal tetap diperlukan untuk lebih meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi pengawasan di masa mendatang.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar belakang masalah

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia menuntut setiap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu instrumen terpenting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), karena seluruh program dan kegiatan pemerintah dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut [1], pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Sejalan dengan hal tersebut, [2] menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan daerah dapat dinilai dari kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan belanja secara proporsional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Belanja daerah merupakan salah satu komponen utama dalam APBD yang berfungsi sebagai instrumen pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, melaksanakan program pembangunan, serta memberdayakan masyarakat. Dalam struktur APBD, belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran yang manfaatnya habis dalam satu tahun anggaran, sedangkan belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Menurut [3], proporsi belanja operasi dan belanja modal merupakan salah satu indikator penting yang mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan daerah karena menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan operasional pemerintah dan investasi publik dalam penyediaan aset pelayanan masyarakat.

Belanja operasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kelancaran penyelenggaraan fungsi pemerintahan karena digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, serta berbagai kebutuhan operasional lainnya. Sebaliknya, belanja modal bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai. [4] menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menjaga keseimbangan yang proporsional antara belanja operasi dan belanja modal, karena dominasi belanja operasi yang terlalu besar dapat mengurangi kapasitas fiskal pemerintah dalam melakukan investasi jangka panjang melalui belanja modal.

Dalam praktiknya, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengalokasikan belanja daerah secara proporsional. Tingginya kebutuhan belanja pegawai dan biaya operasional menyebabkan porsi belanja operasi jauh lebih besar dibandingkan belanja modal. Kondisi ini membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan aset tetap dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, analisis terhadap komposisi belanja operasi dan belanja modal menjadi penting untuk mengetahui apakah kebijakan alokasi anggaran telah mencerminkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sebagaimana diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki peran strategis sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat bertanggung jawab melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kepada seluruh perangkat daerah. Efektivitas pelaksanaan tugas tersebut sangat bergantung pada ketersediaan dukungan anggaran yang memadai, baik dalam bentuk belanja operasi maupun belanja modal. Belanja operasi diperlukan untuk membiayai kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, perjalanan dinas, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya, sedangkan belanja modal diperlukan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung, seperti komputer, peralatan teknologi informasi, kendaraan operasional, dan aset tetap lainnya.

Menurut Mahmudi [2], pengelolaan anggaran yang baik tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mengalokasikan belanja sesuai dengan kebutuhan prioritas. Oleh karena itu, analisis terhadap belanja operasi dan belanja modal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menjadi penting untuk mengetahui apakah alokasi anggaran telah mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi secara optimal.

Penelitian-penelitian terdahulu telah mengkaji belanja modal dari berbagai perspektif. [5] menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah. Selanjutnya, [6] menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal pemerintah daerah, sedangkan pengaruh Dana Alokasi Umum cenderung bervariasi. [7] juga membuktikan bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap besarnya alokasi belanja

modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, [6] menemukan bahwa informasi mengenai SiLPA dan arus kas pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap penganggaran belanja modal.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal di tingkat provinsi atau secara agregat pada tingkat kabupaten/kota dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian yang ada lebih banyak menganalisis hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, SiLPA, dan pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal, sedangkan penelitian yang mengkaji komposisi belanja operasi dan belanja modal pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih relatif terbatas. Secara lebih khusus, penelitian yang menjadikan Inspektorat Daerah sebagai objek penelitian masih sangat sedikit ditemukan dalam literatur akuntansi sektor publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) yang perlu diatasi melalui penelitian yang secara khusus menganalisis struktur, perkembangan, proporsi, dan efektivitas belanja operasi serta belanja modal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain adanya kesenjangan penelitian, terdapat pula kesenjangan empiris (empirical gap). Secara normatif, pemerintah daerah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran secara seimbang antara kebutuhan operasional dan investasi pada aset tetap guna menjamin efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Namun, dalam praktiknya sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah masih mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar pada belanja operasi dibandingkan belanja modal karena tingginya kebutuhan belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Kondisi ini berpotensi mengurangi kapasitas organisasi dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis terhadap pola belanja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk mengetahui apakah komposisi belanja yang diterapkan telah sesuai dengan kebutuhan organisasi dan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian yang berjudul "**Analisis Belanja Operasi dan Belanja Modal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**" dipandang penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan, proporsi, dan efektivitas belanja operasi serta belanja modal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Selain memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi dan meningkatkan praktik pengelolaan anggaran, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur akuntansi sektor publik, khususnya yang berkaitan dengan analisis belanja daerah pada tingkat Organisasi Perangkat Daerah.

### Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat rasio belanja operasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana tingkat rasio belanja modal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir?

### Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat rasio belanja operasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui tingkat rasio belanja modal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. LANDASAN TEORI

### Kinerja Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja didefinisikan sebagai keluaran atau hasil yang telah dicapai atau yang diharapkan dapat dicapai dari suatu kegiatan atau program yang berkaitan dengan penggunaan anggaran, yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kinerja merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan program-programnya untuk mewujudkan tujuan organisasi, menghasilkan keluaran kerja, memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan, serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi masyarakat [8].

Kinerja diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi sebagaimana tertuang dalam perencanaan strategisnya. Secara umum, kinerja menunjukkan prestasi yang berhasil dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Selanjutnya, [9] dan [10] menjelaskan bahwa kinerja keuangan sektor publik merupakan ukuran keberhasilan organisasi pemerintah dalam mengelola anggaran dan sumber daya publik secara ekonomis, efisien, dan efektif untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penilaian kinerja keuangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya keuangan yang tersedia secara optimal.

Menurut [11], kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian di bidang keuangan yang diukur menggunakan indikator-indikator tertentu melalui analisis laporan keuangan daerah. Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan organisasi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sementara itu, [12] menjelaskan bahwa kinerja keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan dan mengelola sumber-sumber keuangan secara efektif dan efisien guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, seluruh aktivitas organisasi harus dicatat dan dievaluasi dengan baik. Pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada masukan (input) program, tetapi juga pada keluaran (output) yang dihasilkan dari program tersebut [13]. Ukuran kinerja (performance measures) dan indikator kinerja (performance indicators) merupakan dua konsep yang berbeda. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian langsung terhadap kinerja organisasi, sedangkan indikator kinerja merupakan penilaian tidak langsung yang hanya berfungsi sebagai petunjuk atau sinyal mengenai tingkat kinerja organisasi.

#### **Rasio Keuangan Daerah**

Rasio keuangan daerah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan data yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta laporan keuangan pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif, efisien, mandiri, dan akuntabel. Menurut [14], analisis rasio keuangan daerah merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah dengan membandingkan unsur-unsur tertentu dalam laporan keuangan selama satu atau beberapa periode akuntansi.

Menurut [15], rasio keuangan sektor publik digunakan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah daerah, mengevaluasi pelaksanaan anggaran, serta mengukur efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Analisis keuangan merupakan upaya untuk mengidentifikasi karakteristik keuangan suatu pemerintah daerah berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan kinerja keuangan dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan (tren) perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah [16].

#### **Rasio Kesenjangan**

Rasio keserasian merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan dalam analisis keuangan pemerintah daerah untuk mengevaluasi keseimbangan alokasi belanja daerah. Rasio ini memberikan gambaran mengenai proporsi penggunaan anggaran antara belanja operasi dan belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Melalui rasio keserasian, dapat diketahui sejauh mana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi anggaran untuk membiayai kegiatan operasional pemerintahan dibandingkan dengan investasi pada aset tetap yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut [17], rasio keserasian merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur proporsi belanja operasi dan belanja modal terhadap total belanja daerah. Tujuan utama rasio ini adalah untuk mengetahui apakah pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran secara seimbang sesuai dengan kebutuhan operasional dan kebutuhan pembangunan daerah. Semakin proporsional komposisi belanja yang dialokasikan, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya.

Selanjutnya, [18] menjelaskan bahwa rasio keserasian mencerminkan keseimbangan antara belanja rutin dan belanja investasi. Belanja operasi diperlukan untuk menjamin keberlangsungan aktivitas pemerintahan sehari-hari, sedangkan belanja modal diperlukan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan publik melalui pengadaan aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, kedua jenis belanja tersebut harus dialokasikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan operasional dan pembangunan organisasi.

Menurut [19], pengelolaan keuangan sektor publik harus berpedoman pada prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau yang dikenal dengan konsep *value for money*. Salah satu indikator yang digunakan untuk

menilai penerapan prinsip tersebut adalah komposisi belanja daerah. Apabila sebagian besar anggaran hanya dialokasikan untuk kegiatan operasional tanpa diimbangi dengan investasi melalui belanja modal, maka kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat menjadi kurang optimal.

Dalam praktiknya, belum terdapat standar baku mengenai proporsi ideal antara belanja operasi dan belanja modal karena setiap pemerintah daerah memiliki karakteristik, kemampuan keuangan, serta prioritas pembangunan yang berbeda. Pemerintah daerah yang memiliki wilayah luas dan masih memerlukan pembangunan infrastruktur umumnya membutuhkan proporsi belanja modal yang lebih besar. Sebaliknya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih berorientasi pada fungsi administratif dan pengawasan, seperti Inspektorat Daerah, cenderung mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar pada belanja operasi karena sebagian besar kegiatannya bergantung pada sumber daya manusia dan biaya operasional.

#### **Rasio Belanja Operasi**

Rasio Belanja Operasi digunakan untuk mengetahui proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah. Menurut Mahmudi [4], rasio ini menunjukkan tingkat prioritas pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan selama satu tahun anggaran. Rumus perhitungan Rasio Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = (\text{Belanja Operasi} / \text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio belanja operasi menunjukkan bahwa semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk membiayai aktivitas operasional pemerintah yang bersifat rutin. Meskipun kondisi ini dianggap wajar bagi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), proporsi yang terlalu tinggi dapat mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan investasi pada aset tetap melalui belanja modal.

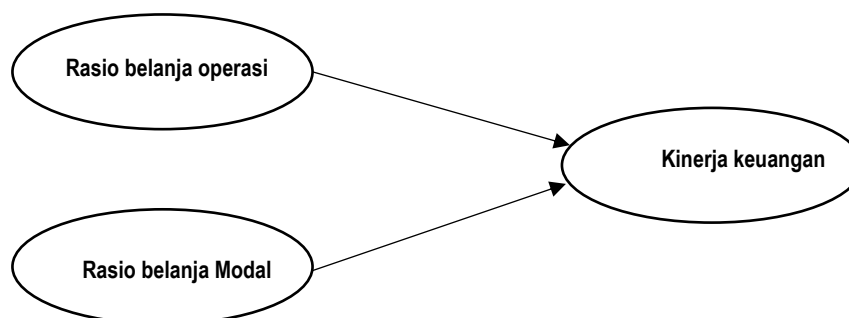
#### **Rasio Belanja Modal**

Rasio Belanja Modal digunakan untuk mengetahui proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah. Menurut [10], rasio ini mencerminkan tingkat perhatian pemerintah daerah terhadap investasi jangka panjang pada aset tetap yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Rumus perhitungan Rasio Belanja Modal adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = (\text{Belanja Modal} / \text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio belanja modal menunjukkan semakin besarnya investasi pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik. Namun demikian, proporsi belanja modal harus disesuaikan dengan karakteristik dan fungsi operasional organisasi agar penggunaan anggaran tetap efektif dan efisien.

#### **KERANGKA PEMIKIRAN**



**gambar 1. Kerangka pemikiran**

(Data: compiled by researchers)

#### **Hipotesis**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Diduga kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang diukur dengan Rasio Belanja Operasi telah mencapai tingkat yang optimal.

2. Diduga kinerja keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang diukur dengan Rasio Belanja Modal telah mencapai tingkat yang optimal.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan data yang sebenarnya secara sistematis dan objektif, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis untuk menarik kesimpulan mengenai variabel yang diteliti. Pendekatan deskriptif analitis memungkinkan peneliti memberikan gambaran yang komprehensif mengenai fenomena penelitian sekaligus menganalisis hasil yang diperoleh untuk mencapai tujuan penelitian.

#### Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 745, Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Indonesia. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Desember 2026 sampai dengan selesai.

#### Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir periode tahun 2023 sampai dengan 2024. Sampel dalam penelitian ini merupakan seluruh data laporan keuangan yang menjadi populasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teknik **sampling jenuh (sensus)**, yaitu teknik penentuan sampel dengan menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian.

#### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen yang tersedia di Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain laporan keuangan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

##### b. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data melalui penelaahan berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, dan referensi akademik lainnya, guna memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### Data Analysis

##### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan daerah, yang terdiri atas:

##### 1. Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi digunakan untuk mengukur proporsi belanja operasi terhadap total belanja daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = (\text{Belanja Operasi} / \text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%$$

##### 2. Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal digunakan untuk mengukur proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = (\text{Belanja Modal} / \text{Total Belanja Daerah}) \times 100\%$$

### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Penelitian

##### Analisis Rasio Keuangan Daerah

Menurut Halim [20], kinerja keuangan atau kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Untuk

mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dilakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) [1].

Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa terdapat beberapa analisis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan daerah. Rasio-rasio tersebut dikembangkan berdasarkan data keuangan yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), meliputi Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, dan Rasio Kekeragaman. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan analisis pada Rasio Kekeragaman, khususnya melalui analisis Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal, dengan perhitungan sebagai berikut:

### 1. Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Rasio Belanja Operasi menggambarkan tingkat prioritas pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan operasional pemerintahan selama satu tahun anggaran. Hasil perhitungan Rasio Belanja Operasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.1 Rasio Belanja Operasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

| Year | Operating Expenditure | Total Expenditure   | Ratio (%) |
|------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 2023 | Rp10,805,277,040.13   | Rp11,139,532,040.13 | 96.9      |
| 2024 | Rp12,541,361,369.27   | Rp13,133,423,329.27 | 95.4      |

Source: Processed data by the researcher

Berdasarkan hasil perhitungan, Rasio Belanja Operasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar **96,9%** pada tahun 2023 dan menurun menjadi **95,4%** pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk membiayai kegiatan operasional organisasi. Penurunan rasio pada tahun 2024 mengindikasikan adanya sedikit perbaikan dalam komposisi belanja, karena alokasi anggaran untuk jenis belanja lainnya, khususnya belanja modal, mengalami peningkatan.

### 2. Perhitungan Rasio Belanja Modal

Rasio Belanja Modal menunjukkan tingkat perhatian pemerintah daerah terhadap investasi jangka panjang dalam bentuk aset tetap yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hasil perhitungan Rasio Belanja Modal disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 4.2 Rasio Belanja Modal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir**

| Year | Capital Expenditure | Total Expenditure   | Ratio (%) |
|------|---------------------|---------------------|-----------|
| 2023 | Rp334,255,000.00    | Rp11,139,532,040.13 | 3.0       |
| 2024 | Rp592,962,000.00    | Rp13,133,423,329.27 | 4.5       |

Source: Processed data by the researcher

Berdasarkan hasil perhitungan, Rasio Belanja Modal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar **3,0%** pada tahun 2023 dan meningkat menjadi **4,5%** pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk investasi jangka panjang dalam bentuk aset tetap masih relatif terbatas, namun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan rasio belanja modal tersebut mencerminkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja organisasi serta kualitas pelayanan publik.

## Pembahasan

### 1. Analisis Rasio Belanja Operasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Belanja Operasi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 96,9% pada tahun 2023, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 95,4%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran belanja Inspektorat dialokasikan untuk membiayai kegiatan operasional organisasi, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta kegiatan pengawasan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Inspektorat. Tingginya proporsi belanja operasi merupakan kondisi yang relatif wajar mengingat Inspektorat Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lebih berorientasi pada fungsi pengawasan dibandingkan pembangunan fisik. Pelaksanaan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan terhadap perangkat daerah memerlukan sumber daya manusia yang memadai dan biaya operasional yang cukup besar. Oleh karena itu, kebutuhan belanja operasi cenderung lebih dominan dibandingkan belanja modal.

Apabila dibandingkan antara tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya sedikit penurunan pada Rasio Belanja Operasi. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai memberikan alokasi yang lebih besar terhadap belanja modal tanpa mengurangi kemampuan organisasi dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Kondisi ini mencerminkan adanya upaya untuk menciptakan komposisi belanja yang lebih seimbang sehingga kualitas pengelolaan anggaran dapat semakin ditingkatkan.

Menurut Mahmudi [21], Rasio Belanja Operasi digunakan untuk mengetahui tingkat prioritas pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan rutin penyelenggaraan pemerintahan. Semakin tinggi rasio belanja operasi, semakin besar pula porsi anggaran yang digunakan untuk membiayai aktivitas rutin pemerintahan. Namun demikian, apabila proporsi tersebut terlalu tinggi secara terus-menerus, ruang fiskal pemerintah untuk melakukan investasi melalui belanja modal akan menjadi semakin terbatas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Halim dan Kusufi [12] yang menjelaskan bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang bergerak di bidang pelayanan administratif dan pengawasan pada umumnya memiliki proporsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan belanja modal. Selain itu, temuan ini juga mendukung penelitian Ida Rachmawati [18] yang menyatakan bahwa sebagian besar anggaran Inspektorat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehingga efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan tetap terjaga.

## 2. Analisis Rasio Belanja Modal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Belanja Modal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 3,0% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 4,5% pada tahun 2024. Meskipun masih relatif kecil dibandingkan dengan belanja operasi, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pemenuhan kebutuhan aset tetap yang mendukung pelaksanaan tugas pengawasan. Belanja modal pada Inspektorat umumnya digunakan untuk pengadaan komputer, peralatan teknologi informasi, kendaraan operasional, peralatan perkantoran, serta aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun anggaran. Peningkatan Rasio Belanja Modal pada tahun 2024 menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kerja sehingga fungsi pengawasan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Rasio Belanja Modal menggambarkan tingkat investasi pemerintah dalam penyediaan aset tetap yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Semakin tinggi rasio belanja modal menunjukkan semakin besar komitmen pemerintah dalam meningkatkan kapasitas organisasi melalui investasi jangka panjang. Namun demikian, besarnya belanja modal tetap harus disesuaikan dengan karakteristik organisasi agar tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan operasional.

Berdasarkan karakteristik Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), proporsi belanja modal yang relatif kecil masih dapat dianggap wajar karena sebagian besar aktivitas organisasi lebih bergantung pada kompetensi sumber daya manusia dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik. Meskipun demikian, peningkatan Rasio Belanja Modal dari tahun 2023 ke tahun 2024 merupakan perkembangan yang positif karena menunjukkan adanya peningkatan investasi terhadap sarana pendukung kegiatan pengawasan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian [17] yang menyatakan bahwa pemanfaatan anggaran pada Inspektorat telah berjalan relatif efisien, namun masih diperlukan peningkatan kualitas perencanaan anggaran agar pengadaan sarana dan prasarana dapat lebih optimal. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian A.D. Sanggalangi [6] yang menyimpulkan bahwa evaluasi terhadap perencanaan anggaran dapat meningkatkan akuntabilitas serta kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023–2024, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Inspektorat masih didominasi oleh belanja operasi. Rasio Belanja Operasi sebesar 96,9% pada tahun 2023 dan mengalami penurunan menjadi 95,4% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan operasional rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, serta kegiatan pengawasan. Dominasi belanja operasi tersebut merupakan kondisi yang wajar mengingat fungsi utama Inspektorat adalah sebagai lembaga pengawasan yang pelaksanaan

tugasnya lebih banyak bergantung pada sumber daya manusia dan kegiatan operasional dibandingkan pembangunan infrastruktur fisik.

Sementara itu, Rasio Belanja Modal mengalami peningkatan dari 3,0% pada tahun 2023 menjadi 4,5% pada tahun 2024. Meskipun proporsi belanja modal masih lebih kecil dibandingkan belanja operasi, peningkatan tersebut menunjukkan adanya upaya positif pemerintah daerah dalam meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan. Kondisi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kapasitas organisasi melalui investasi pada aset tetap, seperti peralatan teknologi informasi, fasilitas perkantoran, dan aset pendukung lainnya.

Secara keseluruhan, komposisi belanja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan pola alokasi anggaran yang relatif sesuai dengan karakteristik dan fungsi organisasi. Proporsi belanja operasi yang lebih besar sejalan dengan peran Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), sedangkan peningkatan belanja modal secara bertahap menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran menuju struktur belanja yang lebih seimbang. Meskipun demikian, evaluasi secara berkelanjutan tetap diperlukan agar alokasi anggaran tetap efektif, efisien, dan mampu mendukung peningkatan kinerja pengawasan.

## 6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, disarankan untuk mempertahankan efektivitas pengelolaan belanja operasi sekaligus secara bertahap meningkatkan alokasi belanja modal, terutama untuk pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan. Investasi pada teknologi informasi, sistem audit berbasis digital, serta peralatan kerja yang modern perlu diprioritaskan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan pengawasan.
2. Dalam perencanaan anggaran, Inspektorat perlu meningkatkan kualitas perencanaan belanja dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, target kinerja, serta prioritas jangka panjang. Alokasi yang lebih seimbang antara belanja operasi dan belanja modal perlu terus diupayakan agar ketergantungan terhadap belanja rutin dapat dikurangi serta memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pengembangan kapasitas organisasi.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, diharapkan tetap memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada Inspektorat sesuai dengan perannya yang strategis sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Penguatan kapasitas Inspektorat melalui investasi pada teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas tata kelola keuangan daerah.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menambahkan indikator-indikator kinerja keuangan lainnya, seperti rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, dan rasio aktivitas, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kinerja keuangan Organisasi Perangkat Daerah.

## BIBLIOGRAPHY

- [1] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. 2018.
- [2] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 2016.
- [3] A. Halim, *Public Sector Accounting*. 2007.
- [4] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 2010.
- [5] Muhammad fauzan and Defitri Rusdiyanti, "ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI ALUR KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) BERKAH AMANAH (Studi Kasus Di Desa Pekan Kamis Kecamatan Tembilahan Hulu)," *J. Anal. Manaj.*, vol. 8, no. 2, pp. 102–117, 2022, [Online]. Available: <https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/jam/article/view/2419/1347>
- [6] R. Riswati and Y. Bukhori, "Analisis Rasio Kesenjangan Belanja Modal dan Operasional serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Kota Bandung," *J. Ekon. dan Keuang. Publik*, vol. 10, no. 1, 2023.
- [7] P. P. Widiyanto and S. Isnowati, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19," *SEIKO J. Manag. Bus.*, vol. 6, no. 2, 2023.
- [8] R. Hafizi and F. A. Amalia, "Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember," *Jati J. Akunt. Terap. Indones.*, vol. 5, no. 2, 2022.
- [9] G. A. M. Mojambo, J. E. Tulung, and ..., "The Influence of Top Management Team (TMT) Characteristics

- Toward Indonesian Banks Financial Performance During the Digital Era (2014-2018)," ... *Manaj. Bisnis dan ...*, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jmbi/article/view/27619>
- [10] F. Nugroho and A. Rohman, "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening," *Diponegoro J. Account.*, vol. 1, no. 2, 2012.
- [11] K. K. Katsaros, A. N. Tsirikas, and G. C. Kosta, "The impact of leadership on firm financial performance: the mediating role of employees' readiness to change," *Leadersh. Organ. Dev. J.*, vol. 41, no. 3, 2020.
- [12] A. Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- [13] M. I. Sohilaui, "Moderasi Inklusi Keuangan Terhadap Hubungan Literasi Keuangan dan Keputusan Struktur Modal UKM," *JBIMA (Jurnal Bisnis dan Manajemen)*. researchgate.net, 2018. [Online]. Available: [https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Sohilaui/publication/331464441\\_Moderasi\\_Inklusi\\_Kuangan\\_Terhadap\\_Hubungan\\_Literasi\\_Kuangan\\_dan\\_Keputusan\\_Struktur\\_Modal\\_UKM/links/5c7a055992851c69504c3397/Moderasi-Inklusi-Kuangan-Terhadap-Hubungan-Literasi](https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Sohilaui/publication/331464441_Moderasi_Inklusi_Kuangan_Terhadap_Hubungan_Literasi_Kuangan_dan_Keputusan_Struktur_Modal_UKM/links/5c7a055992851c69504c3397/Moderasi-Inklusi-Kuangan-Terhadap-Hubungan-Literasi)
- [14] A. E. Pratiwi, A. D. Nurfadillah, L. Nursadrina, L. Mufida, Nurjannah, and S. R. Nengsi, "Inklusi Keuangan dalam Industri Perbankan: Mendorong Akses Layanan Perbankan," *J. Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekon.*, vol. 1, no. 1, pp. 19–24, 2023, doi: 10.59971/jimbe.v1i1.4.
- [15] A. Triyassari and Y. Sambharakreshna, "Value For Money dan Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan Daerah," *J. Akunt. dan Keuang. Kontemporer*, vol. 7, no. 2, 2024.
- [16] S. Usman and N. Savitri, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2020-2024," *SENTRI J. Ris. Ilm.*, 2026.
- [17] T. P. Pasaribu, A. R. Syahputra, A. F. El Wajdi, and R. Maisyarah, "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Berdasarkan Rasio Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Efisiensi, dan Keserasian Keuangan Daerah Tahun 2023-2024," *J. Spektrum Ekon.*, 2026.
- [18] W. Ariadi, "Evaluasi Kinerja Keuangan Pemerintah dalam Perspektif Rasio Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Keserasian Anggaran Belanja Provinsi Papua," *J. Sains, Ekon. Manajemen, Akunt. dan Huk.*, 2025.
- [19] L. A. Wardani and D. Fitrayati, "Pengaruh literasi keuangan dan sikap keuangan terhadap perilaku pengelolaan keuangan dengan locus of control sebagai variabel intervening," *Fair Value J. Ilm. Akunt. dan Keuang.*, vol. 4, no. 12, pp. 5827–5836, 2022, doi: 10.32670/fairvalue.v4i12.1894.
- [20] A. Halim, *Akuntansi Keuangan Daerah*. 2007.
- [21] Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019.